

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

a. Pengaturan Pidanaan Terhadap Tindak pidana perjudian diatur dalam KUHP terdiri dari 2(dua) pasal, yaitu pasal 303, dan pasal 303 bis. Pidanaan dalam kasus ini tidak mencakup keseluruhan pelaku tindak pidana. Pelaku yang dipidana hanya pelaku yang turut serta dalam perusahaan perjudian togel Singapura sebagai member. Sedangkan pelaku lain sebagai pelaku yang menawarkan kepada umum kesempatan untuk bermain judi tidak dipidana.

Jika dikaitkan dengan tujuan pembentukan hukum pidana yang memberikan ketentuan penyertaan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 55, peran para pihak sebenarnya adalah keturutsertaan dimana peranan terpidana (sdr.Fredy) berkaitan dengan melanjutkan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain (sdr.anam, sdr.Jefri,sdr.Luky) sebagaimana terbukti dari data tumbukan pada handphone yakni merekap hasil tumbukan judi yang dikumpulkan dari masyarakat. Jika terpidana berperan memberikan kesempatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 303 ayat(1) maka, tindakan pihak lain ini adalah pasal 303 ayat(2).

b. Tindak pidana perjudian pada kasus diatas memenuhi definis tindak kriminal terorganisasi yang bersifat transnasional sebagaimana ditetapkan oleh UU no 5 tahun 2009. Hal ini dapat dipastikan karena tindak pidana perjudian ini merupakan macam tindak pidana di Indonesia yang memiliki ancaman diatas 4 tahun dan dilakukan oleh beberapa orang secara terorganisir.

Bersifat transnasional karena tindak pidana ini dilakukan di lebih dari 1 wilayah negara dan memberikan efek kerugian kepada masyarakat di negara lain. Yang dalam hal ini dilakukan di Singapura dan negara-negara lain seperti Indonesia turut serta mengikuti hasil pengundian nomer togel tersebut.

V.2 Saran

- a. Pidana Terhadap Tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam KUHP selayaknya melihat keseluruhan pelaku tindak pidana perjudian sebagai suatu kesatuan pelaku tindak pidana yang terorganisir. Pidana yang secara menyeluruh ini perlu dilakukan dengan cara mempidanakan keseluruhan pelaku, yakni para penombok, penjudi, dan penerima tombokan judi karena kesatuan kegiatan perjudian ini baru akan dapat memenuhi tindak pidana perjudian.

Untuk itulah kiranya pemerintah dapat mempertegas kembali tentang pengaturan tata cara pidana tindak pidana perjudian, dan perlu membedakan antara perjudian yang menggunakan perlombaan mandiri dengan perjudian yang melakukan/atau mengadakan penentuan kemenangan secara sendiri seperti kasus diatas. Yang secara nyata-nyata memang menyelenggarakan secara terorganisir tindak pidana perjudian.

- b. Terhadap penerapan perjudian sebagai tindak pidana organisasi yang bersifat transnasional, pemerintah perlu membuka hubungan dengan negara lain yang dalam hal ini singapura berkaitan dengan pidana para pelaku tindak pidana perjudian di luar negeri. Dengan pidana perjudian sebagai tindak kriminal organisasi transnasional maka indonesia akan lebih efektif dan efisien menegakkan hukum pidana terutama perjudian.

Melalui kesepakatan ini maka para pihak, penyelenggara pengundian nomor togel disingapura dapat dipidana karena menyelenggarakan tindak pidana di Indonesia. Sebaliknya terhadap aset dan harta hasil pemasangan nomor perjudian dapat dilakukan penyitaan sebagaimana diamanatkan dalam UU no 5 tahun 2009.